

**KEBIJAKAN TENTANG *BANGGA MBANGUN DESA*
PERSPEKTIF EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM**
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015)



TESIS

**Disusun dan Diajukan Kepada Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)**

**Oleh:
NAERUL EDWIN KIKY APRIANTO
NIM. 1522601008**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2017**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN DIREKTUR	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)	vi
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
DAFTAR SINGKATAN	xxii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	
A. Konsep Kebijakan Publik	12
B. Konsep Ekonomi Pembangunan Islam	15
C. Konsep Struktur Kebijakan Ekonomi	30
D. Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam	39
E. Konsep <i>Maqāṣid asy-Syarīah</i>	45
F. Konsep Negara Kesejahteraan	48

	G. Hasil Penelitian yang Relevan	55
	H. Kerangka Berpikir	66
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	68
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	69
	C. Sumber Data	69
	D. Teknik Pengumpulan Data	70
	E. Teknik Analisis Data	72
BAB IV	<i>BANGGA MBANGUN DESA</i> DALAM TINJAUAN EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM	
	A. Gambaran Umum Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap	75
	1. Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap	75
	2. Kedudukan, Tupoksi, dan Susunan Organisasi Pemerintah	77
	3. Visi dan Misi Kabupaten Cilacap	79
	4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap	84
	B. Konsep Dasar <i>Bangga Mbangun Desa</i>	88
	C. Implementasi <i>Bangga Mbangun Desa</i>	96
	D. Kebijakan <i>Bangga Mbangun Desa</i> dalam Ekonomi Pembangunan Islam	122
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	134
	B. Rekomendasi	135
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih melebarinya kesenjangan antar wilayah. Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antar wilayah terutama terjadi antara perdesaan dengan perkotaan, maupun antara Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa. Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Oleh sebab itu, rencana strategis sangat diperlukan oleh pemerintah daerah dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai,¹ sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah daerah Kabupaten Cilacap mengeluarkan kebijakan tentang *Bangga Mbangun Desa* yang bertujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan di wilayah perdesaan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari gerakan *Bali Ndeso Mbangun Ndeso*,² sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal dalam mewujudkan desa mandiri. Oleh karena itu, kebijakan *Bangga Mbangun Desa* ini lebih menekankan pada pentingnya melakukan pembangunan mulai dari desa. Dengan

¹ Perencanaan yang demikian menentukan perubahan-perubahan struktural yang diperlukan dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan laju pertumbuhan, sehingga perlu dibentuk lembaga-lembaga untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Lihat M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 336.

² Gerakan *Bali Ndeso Mbangun Ndeso* merupakan program yang diusung oleh H. Bibit Waluyo kepada rakyat untuk menuju Jawa Tengah 1 pada Pilgub Tahun 2008. Inti gerakan *Bali Ndeso Mbangun Ndeso* adalah mengajarkan kepada yang sudah pandai menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan segan memberikan ilmunya kepada saudara-saudaranya (masyarakat) di desa, agar bisa pandai dan berdaya dalam mendayagunakan sumber daya yang ada di desa, sehingga pembangunan di desa menjadi maju dan masyarakatnya sejahtera. Demikian pula bagi yang sudah kaya dan berkelebihan harta, jangan segan membantu hibah dana, modal usaha, dan pendampingan usaha, agar perekonomian masyarakat desa semakin tumbuh. Adapun implementasi visi dan misi pembangunan dari kebijakan *Bali Ndeso Mbangun Ndeso* dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu: 1) Tahap konsolidasi dan persiapan (2008-2009); 2) Tahap percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara lestari dan pelayanan prima dalam *E-Government* (2010-2011); dan 3) Tahap perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing tinggi (2012-2013). Lihat Budi Nur Hadi Wibowo, "Efektivitas Kebijakan *Bali Ndeso Mbangun Ndeso* di Kabupaten Pekalongan", *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 3.

adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat desa bangkit, kreatif, inovatif dan bekerja keras, serta mampu mendayagunakan potensi sumber daya yang ada di desanya masing-masing untuk kemajuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejalan dengan gerakan *Bali Ndeso Mbangun Ndeso* ini, kebijakan *Bangga Mbangun Desa* yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap merupakan panduan bagi lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi di perdesaan tanpa meninggalkan penataan kota dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Hal ini mengingat bahwa Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Tengah, sehingga diperlukan terobosan percepatan pembangunan demi tercapainya sasaran-sasaran di Kabupaten Cilacap sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).³

Filosofi dasar dari kebijakan *Bangga Mbangun Desa* adalah jika desa-desa maju, maka Kabupaten Cilacap akan maju. Jika Cilacap maju, maka Jawa Tengah juga maju. Jika Jawa Tengah maju, maka Indonesia ikut maju.⁴ Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan perannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan *Bangga Mbangun Desa*.

Sebagai strategi dasar, kebijakan *Bangga Mbangun Desa* mempunyai empat pilar yang meliputi: (1) pilar pendidikan; (2) pilar kesehatan; (3) pilar ekonomi; dan (4) pilar lingkungan sosial budaya.⁵ Untuk menjamin pelaksanaan kebijakan *Bangga Mbangun Desa*, semua pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap,

³ Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 telah ditetapkan empat prioritas program, yaitu: 1) Infrastruktur; 2) Pendidikan; 3) Kesehatan; dan 4) Pemberdayaan masyarakat melalui sektor pertanian dan UMKM.

⁴ Filosofi kebijakan *Bangga Mbangun Desa* ini dipaparkan Tatto Suwanto Pamuji selaku Bupati Kabupaten Cilacap. Lihat Suara Merdeka, "Bupati Paparkan Kebijakan *Bangga Mbangun Desa*" (Kamis, 28 Januari 2016), dalam <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/bupati-paparkan-kebijakan-bangga-mbangun-desa/>, di akses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 19.25 WIB.

⁵ Empat pilar tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan *Bangga Mbangun Desa*, Bab III Pilar *Bangga Mbangun Dcsa*, Pasal 4.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swasta dan swadaya masyarakat.⁶ Apabila dilihat dari sisi pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Cilacap yang bersumber dari pendapatan asli daerah,⁷ dana perimbangan,⁸ dan pendapatan lain-lain⁹ yang dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1.
Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2011-2014 (Ribuan Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014
1.	Kab. Cilacap	1.640.048.746	1.815.453.436	2.121.355.399	2.367.489.500
2.	Kab. Banyumas	1.593.406.456	1.815.446.830	2.037.636.075	2.308.424.398
3.	Kab. Purbalingga	954.170.516	1.087.711.409	1.186.532.498	1.345.621.794
4.	Kab. Banjarnegara	1.078.602.848	1.193.188.804	1.279.702.470	1.289.493.725
5.	Kab. Kebumen	1.273.102.297	1.446.655.242	1.626.530.654	1.821.880.650

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Berdasarkan tabel 1 di atas, penerimaan pendapatan daerah Kabupaten Cilacap mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari sisi penerimaan pendapatan daerah di antara lima kabupaten/kota (se-Barlingmascakeb), maka Kabupaten Cilacap mempunyai pendapatan daerah tertinggi dibanding kabupaten-kabupaten yang lain.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah Kabupaten Cilacap juga memiliki pendapatan asli daerah. Maksud dari pendapatan asli daerah adalah

⁶ Peraturan Bupati Cilacap Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan *Bangga Mbangun Desa*, Bab V Pembiayaan, Pasal 6.

⁷ Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan ini terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat (18).

⁸ Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat (19).

⁹ Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pinjaman daerah. Dalam hal ini, yang termasuk dalam pendapatan lain-lain adalah dana hibah. Lihat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bab II Prinsip Kebijakan Perimbangan Keuangan, Pasal 3, Ayat (4).

pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah,¹⁰ hasil retribusi daerah,¹¹ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,¹² dan pendapatan lain asli daerah yang sah,¹³ yang bertujuan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan daerah.¹⁴ Adapun pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut:

Tabel 2.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011-2014 (Ribu Rupiah)

No.	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014
1.	Kab. Cilacap	173.141.334	196.673.442	278.507.546	373.906.520
2.	Kab. Banyumas	193.263.340	242.106.509	308.349.434	435.597.688
3.	Kab. Purbalingga	94.937.162	112.727.590	122.858.739	202.593.689
4.	Kab. Banjarnegara	71.107.053	94.271.468	98.975.320	103.502.350
5.	Kab. Kebumen	73.339.838	102.344.166	131.481.737	163.586.346

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas, pendapatan asli daerah Kabupaten Cilacap menunjukkan peningkatan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap memiliki pendapatan asli daerah lebih rendah dibanding Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sangat memengaruhi terhadap peningkatan pendapatan daerah, yang nantinya dapat didistribusikan untuk meningkatkan pembangunan daerah.

¹⁰ Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Lihat Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 9.

¹¹ Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Lihat Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm. 74.

¹² Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Lihat Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 73.

¹³ Pendapatan lain asli daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lihat Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan*, hlm. 74.

¹⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan*, hlm. 51.

Sehubungan dengan hal tersebut, pencapaian hasil kinerja dari penerapan kebijakan *Bangga Mbangun Desa*¹⁵ yang dicanangkan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap yang meliputi pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar ekonomi, dan pilar lingkungan sosial budaya dapat disajikan dalam tabel 3, sebagai berikut:

Tabel 3. Pencapaian Kinerja Kebijakan *Bangga Mbangun Desa*

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2013	Tahun 2014			
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Pilar Pendidikan							
1.	Angka Melek Huruf	%	91,76	92,03	95,61	103,89	Berhasil
2.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	6,92	6,88	7,10	103,19	Berhasil
Pilar Kesehatan							
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Angka	9,30	9,30	9,46	98,28	Berhasil
2.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	29,00	26,00	36,00	61,54	Berhasil
3.	Indeks Harapan Hidup	Tahun	71,63	77,71	77,72	100	Berhasil
4.	Presentase Gizi Buruk	%	0,07	0,02	0,02	100	Berhasil
Pilar Ekonomi							
1.	Pertumbuhan PDRB per Kapita	%	5,21	4,63	4,69	101,30	Berhasil
2.	Presentase Koperasi Aktif	%	82,39	82,23	82,40	100,21	Berhasil
3.	Angka Pengangguran	%	6,76	7,83	6,76	113,67	Berhasil
Pilar Lingkungan Sosial Budaya							
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemda	Nilai	C (Cukup)	CC (Cukup Baik)	CC (Cukup Baik)	100	Berhasil
2.	Proporsi Panjang Jalan dengan Kondisi Baik terhadap Total Panjang Jalan	%	49,01	51,75	51,85	100,19	Berhasil
3.	Proporsi Jaringan Irigasi terhadap Luas Lahan Budidaya Pertanian	%	77,29	77,71	78,13	100,54	Berhasil
4.	Rumah dan Pemukiman Layak Huni Sesuai SPM	%	82,23	87,7	78,93	90,00	Berhasil
5.	Presentase Tersedianya Ruang Terbuka Hijau	%	10	20	14,4	72	Berhasil

Sumber: LKj IP Kabupaten Cilacap, data diolah

Berdasarkan tabel 3 di atas, pencapaian kinerja dari kebijakan *Bangga Mbangun Desa* dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari terealisasinya target yang telah ditetapkan. Namun demikian, banyak kalangan yang berpendapat

¹⁵ Dokumentasi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 pada tanggal 2 November 2016, pukul 13.00 WIB.

bahwa kebijakan *Bangga Mbangun Desa* tersebut belum membuahkan hasil. Hal ini diungkapkan oleh Kamaludin selaku anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang menyatakan bahwa masyarakat belum bisa merasakan hasil dari kebijakan tersebut. Ia menambahkan bahwa *Bangga Mbangun Desa* semestinya jangan hanya menjadi retorika, tetapi harus bisa dilaksanakan.¹⁶ Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Taufik Nur Hidayat selaku ketua DPRD Kabupaten Cilacap bahwa *Bangga Mbangun Desa* yang dicanangkan Bupati Tatto Suwanto Pamuji tidak membuahkan hasil nyata, karena masih banyak wilayah khususnya di pelosok Kabupaten Cilacap yang belum tersentuh pembangunan dan peningkatan taraf hidup meski program tersebut sudah berjalan lebih dari empat tahun.¹⁷

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi merupakan suatu proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi lebih baik dari sebelumnya, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi.¹⁸ Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi bukan hanya bertujuan pada pembangunan material semata, tetapi juga dari segi spiritual dan moral harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi.¹⁹ Kendati demikian, pembangunan ekonomi lazimnya dihubungkan dengan konsep *'imārah al-arḍ* (memakmurkan bumi) sebagaimana dalam QS. Hūd ayat 61: **IAIN PURWOKERTO**

... هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ... ﴿٦١﴾

“...Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya...”²¹ (QS. Hūd [11]: 61)

¹⁶ Suara Merdeka, “*Bangga Mbangun Desa* Belum Sesuai Harapan” (Jumat, 26 Desember 2014), dalam <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/bangga-mbangun-desa-belum-sesuai-harapan/>, di akses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 19.45 WIB.

¹⁷ Fokus Cilacap, “Dituding Program Salah Sasaran, *Bangga Mbangun Desa* Dipertanyakan” (Selasa, 10 Mei 2016), dalam <http://fokuscilacap.com/dituding-program-salah-sasaran-bangga-mbangun-desa-dipertanyakan>, di akses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 07.20 WIB.

¹⁸ Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 11th Edition (New York: Addison-Wesley, 2012), hlm. 16.

¹⁹ Nurul Huda, dkk., *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 21.

²⁰ QS. Hūd [11]: 61.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Qur'an, 2012), hlm. 228.

Allah SWT memerintahkan supaya manusia menciptakan kemakmuran di muka bumi melalui usaha pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pembangunan di mana ekonomi salah satu dimensinya merupakan misi utama penciptaan manusia di muka bumi. Oleh karena itu, tujuan pembangunan ekonomi adalah terpenuhinya dan terpeliharanya *maqāṣid asy-syarīah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai *falāh* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana M. Akram Khan menjelaskan bahwa *falāh* meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik secara mikro maupun secara makro.²²

Untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal, aspek kemampuan aparat pemerintahan sebagai penentu dan penyelenggara dituntut untuk dapat menciptakan nilai keadilan dalam proses pembangunan desa. Dalam hal ini, ekonomi Islam menjunjung tinggi keadilan dalam distribusi, sehingga kekayaan dan pendapatan tidak hanya beredar di antara golongan kaya saja. Oleh karena itu, pertumbuhan dan keadilan distribusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ekonomi Islam.²³ Hal ini senada dengan Ruslan Abdul Ghofur Noor dalam tulisannya yang mengemukakan bahwa kebijakan distribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi akan sulit terwujud jika tidak melibatkan peran institusi yang ada seperti halnya pemerintah dan masyarakat.²⁴ Peran kedua institusi tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan ekonomi.

²² Untuk dapat melangsungkan kehidupan, maka secara mikro manusia membutuhkan pemenuhan kebutuhan biologis seperti kesehatan fisik atau bebas dari penyakit, dalam tataran ekonomi memerlukan kepemilikan faktor produksi, secara sosial memerlukan persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis, dan dalam tataran politik memiliki kebebasan untuk berpartisipasi. Secara makro kelangsungan hidup menuntut adanya keseimbangan ekologi, pengelolaan SDA, dan kebersamaan sosial. Untuk dapat bebas berkeinginan, manusia harus bebas dari kemiskinan dan memiliki kemandirian hidup, sementara pada lingkup makro harus tersedia sumber daya bagi penduduk masa sekarang dan generasi yang akan datang. Adapun untuk bisa memiliki kekuatan dan harga diri, secara mikro setiap orang harus memiliki kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup, dan secara makro harus memiliki kekuatan ekonomi, terbebas dari hutang, dan bahkan memiliki kekuatan militer yang tangguh. Lihat Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics* (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994), hlm. 35-36.

²³ A.H.M. Sadeq, *Economic Development in Islam* (Malaysia: International Islamic University Press, 1990), hlm. 9.

²⁴ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012, hlm. 326-327.

Berkenaan dengan hal tersebut, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat, agar kebijakan tersebut dapat berdampak pada penurunan jumlah tingkat kemiskinan yang selama ini menjadi beban ekonomi, sehingga kemiskinan akan dapat terentaskan. Di samping itu, pemerintah juga mempunyai peran penting dalam mengatur kekayaan sumber daya yang ada supaya kekayaan tersebut tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.

Dengan melihat sejumlah kondisi yang dipaparkan sebelumnya, diperlukan suatu pendekatan yang lebih mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini adalah pendekatan ekonomi pembangunan Islam yang sejatinya hadir ditujukan khusus untuk mengatasi masalah-masalah (keterbelakangan) yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Pendekatan ekonomi pembangunan Islam mengacu pada syariah yang menjadi aturan agama Islam. Sebab setiap perbuatan manusia termasuk kebijakan ekonomi dan pembangunan, serta aktivitas ekonomi masyarakat harus terikat hukum syara.

Menurut M. Fahim Khan, salah satu penyebab kegagalan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang adalah diabaikannya instrumen pembangunan yang tidak selaras dengan norma sosial dan agama para individunya.²⁵ Oleh karenanya, pendekatan konsep ekonomi pembangunan Islam memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan utama dari pendekatan ekonomi pembangunan Islam adalah bagaimana kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu dapat teratasi, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan tentang *Bangga Mbangun Desa* Perspektif Ekonomi Pembangunan Islam (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Periode 2011-2015)”.

²⁵ M. Fahim Khan, *Essays in Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1995), hlm. 70. Lihat juga Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini menekankan pada masalah kebijakan *Bangga Mbangun Desa*. Oleh karena itu, yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa konsep dasar kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tentang *Bangga Mbangun Desa*?
2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tentang *Bangga Mbangun Desa*?
3. Bagaimana kebijakan tersebut ditinjau dalam perspektif ekonomi pembangunan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan konsep dasar kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tentang *Bangga Mbangun Desa*.
- b. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tentang *Bangga Mbangun Desa*.
- c. Untuk menganalisis kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Cilacap tentang *Bangga Mbangun Desa* perspektif ekonomi pembangunan Islam.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Kajian tentang kebijakan *Bangga Mbangun Desa* dalam ekonomi pembangunan Islam masih jarang sekali sehingga sulit menemukannya dalam literatur-literatur yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi dan memenuhi kebutuhan dunia keilmuan, agar dapat dikembangkan lebih luas lagi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna, khususnya bagi para peneliti yang ingin mendalami teori dan konsep

kebijakan pemerintah dalam ekonomi pembangunan Islam. Kepada peneliti lain, dapat melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan yang belum dibahas secara lebih dalam dan relevan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang belum terjawab dalam penelitian ini.

b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan bahan kajian lebih lanjut bagi para pembuat kebijakan, khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam memperhatikan aspek-aspek dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat perspektif ekonomi pembangunan Islam.

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan dalam penulisan tesis ini, penulis membagi tesis ini menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, bagian akhir. Hal ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bagian awal dari tesis ini memuat tentang pengantar yang di dalamnya terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, pernyataan keaslian, abstrak, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar singkatan, dan daftar lampiran.

Bagian isi dari tesis ini terdiri dari lima bab, di mana gambaran mengenai tiap bab dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Bab I, sebagai pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, sebagai landasan teori yang membahas tentang konsep kebijakan publik, konsep ekonomi pembangunan Islam, konsep struktur kebijakan ekonomi, konsep distribusi dalam ekonomi Islam, konsep *maqāṣid asy-syarīah*, konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

Bab III, sebagai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

Bab IV, sebagai hasil pembahasan dan penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian dikomparasikan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. Kemudian data tersebut dianalisis, sehingga mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian yang dilakukan di instansi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap.

Bab V, merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Pada bagian akhir, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian tesis ini, beserta lampiran-lampiran dan biodata penulis.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain:

1. Konsep dasar kebijakan *Bangga Mbangun Desa* tercantum di dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan *Bangga Mbangun Desa*. Kebijakan ini mempunyai empat pilar yang meliputi: (1) pilar pendidikan; (2) pilar kesehatan; (3) pilar ekonomi; dan (4) pilar lingkungan sosial budaya.
2. Implementasi kebijakan *Bangga Mbangun Desa* belum terlaksana secara menyeluruh sesuai dengan konsep dasar kebijakan tersebut. Namun, terdapat beberapa temuan mengenai implementasi kebijakan *Bangga Mbangun Desa* yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - a. Pilar pendidikan, pemerintah menargetkan program wajib belajar 9 tahun (minimal tamat SMP). Akan tetapi, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Cilacap baru mencapai 6,93 tahun. Artinya, rata-rata pendidikan penduduk Cilacap baru mencapai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII, atau baru menamatkan pada jenjang Sekolah Dasar (SD).
 - b. Pilar kesehatan, di mana terjadi penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu, dan anak yang terkena gizi buruk. Kendati demikian, sudah mulai adanya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - c. Pilar ekonomi, pendapatan per kapita masyarakat setiap tahun meningkat. Akan tetapi, angka pengangguran juga meningkat. Hal ini menandakan masih terjadi ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan.
 - d. Pilar lingkungan sosial budaya, terdapat peningkatan terhadap pembangunan infrastruktur seperti jalan dan tersedianya ruang terbuka hijau. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan peningkatan irigasi untuk lahan pertanian dan pemukiman yang layak huni.

3. Kebijakan *Bangga Mbangun Desa* belum sesuai dengan konsep ekonomi pembangunan Islam. Karena di dalam ekonomi pembangunan Islam, tujuan utamanya adalah bagaimana kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu bisa teratasi, sehingga kesejahteraan umat manusia dapat terwujud. Akan tetapi, kebijakan *Bangga Mbangun Desa* tersebut belum terlaksana secara menyeluruh dan masih tampak terjadi adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Cilacap. Oleh karenanya, *Bangga Mbangun Desa* ini juga belum sesuai dengan visi Kabupaten Cilacap, yaitu “Menjadi Kabupaten Cilacap yang Sejahtera Secara Merata”.

B. Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, maka penulis menyumbangkan beberapa rekomendasi sebagai bahan pertimbangan dan proses pengembangan lebih lanjut. Adapun rekomendasi yang dimaksud di antaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Cilacap harus bersinergi dengan pemerintah desa di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan sosial budaya supaya kebijakan *Bangga Mbangun Desa* dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat yang berada di daerah pelosok desa maupun kota.
2. Perlu adanya peningkatan SDM bagi pegawai pemerintah daerah Kabupaten Cilacap sesuai kemampuan yang dimiliki, sehingga kebijakan *Bangga Mbangun Desa* tersebut mempunyai peranan yang lebih optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cilacap.
3. Dalam mengimplementasikan kebijakan *Bangga Mbangun Desa*, diperlukan adanya partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga masyarakat dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan daerah.
4. Dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berpijak pada *Bangga Mbangun Desa*, pemerintah daerah Kabupaten Cilacap hendaknya mengedepankan nilai-nilai keadilan dan pemerataan sesuai dengan konsep ekonomi pembangunan Islam, sehingga dapat meminimalisir kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kabupaten Cilacap.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, Hasan. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afifah, Umi dan Dahlan, Ahmad. 2007. *Konsep Negara Kesejahteraan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Khurshid (ed.). 1980. *Studies Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Amalia, Euis. 2008. "Reformasi Kebijakan Bagi Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia (Analisis Keadilan Distribusi dalam Ekonomi Islam)", *Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Antonio, M. Syafi'i dan Rusydiana, Aam S. 2010. "Peranan Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Daerah", *Harmoni: Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 9, No. 33.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. 2016. "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 12.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmuni. 2003. "Konsep Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal al-Mawarid*, Edisi 10.
- Azwar, Saifuddin. 2016. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakri, Asafri Jaya. 1996. *Konsep Maqāṣid asy-Syarīah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Baswir, Revrison. 2009. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Chapra, M. Umer. 1980. "The Islamic Welfare State and its Role in the Economy", dalam Khurshid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.

- _____. 1992. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation.
- _____. 2000. *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2000. *Sistem Moneter Islam*, terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. 2014. *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Ahmad. 2008. *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Daud, Wan Mohd. Nor Wan. 2005. *Pembangunan di Malaysia ke Arah Satu Kepahaman Baru yang Lebih Sempurna*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya.
- Dimasyqi, Imaḍuḍḍin Ismā'il ibn Umar ibn Katsir al-Qurasyi al-. 1998. *Tafsir al-Qur'an al-Karīm*, Jilid 6. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Djamil, Fathurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dumairy. 1999. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fadlan. 2010. "Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam", *Jurnal al-Ihkam*, Vol. 5, No. 2.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid asy-Syarīah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fuadi, Ariza. 2015. "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Pandangan Islam dan Kapitalisme", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 5, No.1.
- Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-. 1997. *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jilid 1. Beirut: Mu'assisah Ar-Risālah.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harahap, Isnaini dkk. 2015. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Huda, Nurul dkk. 2015. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ikhwan, Afiful. 2014. “Konsepsi Ekonomi Islam untuk Pembangunan Ekonomi Negara”, *Jurnal Eksyar*, Vol. 1, No. 1.
- Jalaluddin, Abdul Khair Mohd. 1991. *The Role of Government in an Islamic Economy*. Kuala Lumpur: A.S. Noordeen.
- Jamaa, La. 2011. “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqāṣid asy-Syarīah*”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 45, No. 2.
- Jomo, K.S., dkk. 2004 *Teori Pembangunan Ekonomi*. Kuala Lumpur: Utusan Publication.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaho, Josef Riwu. 2010. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karim, Adiwarman A. 2012. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2014. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kementerian Agama RI. 2012. *Al-Qur’an dan Terjemah New Cordova* (Bandung: Syaamil Qur’an).
- Khan, M. Fahim. 1995. *Essays in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Khan, Muhammad Akram. 1994. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought.
- Kuncoro, Mudrajat. 2006. *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kurniawan, Nanang Indra. 2009. *Globalisasi dan Negara Kesejahteraan: Perspektif Institusionalisme*. Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM.
- Malik, Hermen. 2016. *Bangun Industri Desa: Selamatkan Bangsa*. Jakarta: Asik Generation.
- Mannan, M. Abdul. 1995. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

- Manzoor, Nayyer. 2006. *Islamic Economics: a Welfare Approach*. New Delhi: Adam Publishers & Distributors.
- Martosoewingno, Sri Soemantri. 2014. *Otonomi Daerah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis: an Expanded Sourcebook*, 2nd Edition. London: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Mohammad. 2011. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Masyarakat Desa*. Yogyakarta: Nadi Pustaka.
- Nabhani, Taqiyuddin an-. 2010. *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Arief B. Iskandar. Bogor: al-Azhar Press.
- Naf'an. 2014. *Ekonomi Makro: Tinjauan Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nafk, Muhammad. 2009. *Benarkah Bunga Haram? Perbandingan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil dan Dampaknya pada Perekonomian*. Surabaya: Amanah Pustaka.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2009. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2012. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2.
- _____. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Surabaya: Pustaka Belajar.
- Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana IAIN Purwokerto Tahun 2016.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Cilacap Nomor 76 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan *Bangga Mbangun Desa*.
- Pogo, Tajuddin. 2010. "Redistribusi Kekayaan Individu dalam Ekonomi Islam", *Disertasi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

- Purwana, Agung Eko. 2013. "Pembangunan dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 1.
- Putong, Iskandar. 2008. *Pengantar Ekonomi Mikro & Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachbini, Didik J. 2004. *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan*. Jakarta: Granit.
- Rahardjo, M. Dawam. 2015. *Arsitektur Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dkk. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rama, Ali dan Makhilani. 2013. "Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarīah*", *Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan, Balitbang Kemenag: Dialog*, Vol. 1, No. 1.
- Rivai, Veithzal. 2009. "Ekonomi Islam sebagai Alat Penanggulangan Krisis Ekonomi Global", dalam Susminingsih, dkk., (ed.), *Ekonomi Syariah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Rosyadi, Slamet. 2010. *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sadeq, A.H.M. 1989. *Islamic Economics*. Lahore: Islamic Publications Pvt.
- _____. 1990. *Economic Development in Islam*. Malaysia: International Islamic University Press.
- Salleh, Muhammad Syukri. 1987. *Pembangunan Berteraskan Islam*. Petaling Jaya: Fajar Bakti.
- Samuelson Paul A. dan Nordhaus, William D. 2010. *Economics*, 19th Edition. New York: McGraw-Hill.
- Syamsuri. 2016 "Paradigma Pembangunan Ekonomi: Satu Analisis Tinjauan Ulang dari Perspektif Ekonomi Islam", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 2.
- Septianingsih, Nanda. 2016. "Implementasi Pilar Pendidikan dalam Kebijakan *Bangga Mbangun Desa* di Kabupaten Cilacap", *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, Edisi 2, Vol. 5.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir al-Misbah*, Jilid 14. Jakarta: Lentera Hati.

- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sulaiman, King Faisal. 2014. *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suntana, Ija. 2010. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Supadie, Didiek Ahmad. 2013. *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Sutedi, Adrian. 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. t.t. *al-Muwāfaqat fi Uṣūl asy-Syariāh*, Jilid 2. Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥaḍīisah.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. 2012. *Economic Development*, 11th Edition. New York: Addison-Wesley.
- _____. 2011. *Pembangunan Ekonomi Jilid 1*, terj. Agus Dharma. Jakarta: Erlangga.
- Triwibowo, Darmawan dan Bahagijo, Sugeng. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: UMM Press.

Wibowo, Budi Nur Hadi. 2015. "Efektivitas Kebijakan *Bali Ndeso Mbangun Ndeso* di Kabupaten Pekalongan", *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 4, No. 2.

Winarno, Budi. 2013. *Etika Pembangunan*. Yogyakarta: CAPS.

_____. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Witjaksono, Mit. 2009. "Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan: Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan", *JESP*, Vol. 1, No. 1.

Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Zarqa, Anas. 1980. "Islamic Economics: an Approach to Human Welfare", dalam Khurshid Ahmad (ed.), *Studies Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.

_____. 1986. "Islamic Distributive Scheme" dalam Munawar Iqbal (ed.), *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics.

Chaudhry, Muhammad Syarif. "Fundamentals of Islamic Economics System", dalam <http://www.muslimtents.com/shaufi/b16index.htm>, di akses pada 6 Juni 2016, pukul 19.25 WIB.

Dokumentasi tentang Indikator Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cilacap Tahun 2015 pada tanggal 10 Mei 2017, pukul 09.00 WIB.

Dokumentasi tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 pada tanggal 2 November 2016, pukul 13.00 WIB.

Dokumentasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 pada tanggal 2 November 2016, pukul 13.00 WIB.

Dokumentasi tentang Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 pada tanggal 2 November 2016, pukul 13.00 WIB.

Dokumentasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2012-2017 pada tanggal 14 Februari 2017, pukul 14.00 WIB.

Fokus Cilacap. “Dituding Program Salah Sasaran, *Bangga Mbangun Desa* Dipertanyakan” (Selasa, 10 Mei 2016), dalam <http://fokuscilacap.com/dituding-program-salah-sasaran-bangga-mbangun-desa-dipertanyakan>, di akses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 07.20 WIB.

Hanifah, Addini Urwah. “Konsep Jaminan Sosial dalam Islam (Tafsir Surat Al-Mā’ūn)”, dalam <http://rimanews.com/read/20110513/27669/jaminan-sosial-islam>, di akses pada tanggal 5 Mei 2017, pukul 19.05 WIB.

Mitchell, Deborah. “Comparing Welfare State”, dalam <http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/wsate.htm>, di akses pada tanggal 3 Januari 2017, pukul 21.00 WIB.

Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, “Kondisi Geografis Kabupaten Cilacap”, dalam www.cilacapkab.go.id, di akses pada tanggal 13 Februari 2017, pukul 13.00 WIB.

Suara Merdeka. “*Bangga Mbangun Desa* Belum Sesuai Harapan” (Jumat, 26 Desember 2014), dalam <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/bangga-mbangun-desa-belum-sesuai-harapan/>, di akses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 19.45 WIB.

Suara Merdeka. “Bupati Paparkan Kebijakan *Bangga Mbangun Desa*” (Kamis, 28 Januari 2016), dalam <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/bupati-paparkan-kebijakan-bangga-mbangun-desa/>, di akses pada tanggal 2 Oktober 2016, pukul 19.25 WIB.

Suharto, Edi. “Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos”, dalam <http://www.policy.hu>, di akses pada tanggal 2 Januari 2017, pukul 20.00 WIB.

Wikipedia, “Kabinet Pembangunan III”, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Kabinet_Pembangunan_III, di akses pada tanggal 1 Februari 2017, pukul 17.26 WIB.